

SISTEM REPOSITORY PRODUK HUKUM DAN NASKAH DINAS

LEGAL DOCUMENTS REPOSITORY SYSTEMS

Doddy Ridwandono^{1*}, Mohamad Irwan Afandi², Eka Dyar Wahyuni³

E-mail : ¹ doddyridwandono.si@upnjatim.ac.id , ² mohamadafandi.si@upnjatim.ac.id,

³ ekawahyuni.si@upnjatim.ac.id

^{1,2,3} Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Kecepatan pertumbuhan produk hukum dan naskah dinas menimbulkan tantangan bagi pihak terkait untuk dapat mencari, mengikuti, serta memahami, terlebih dalam membuat sebuah produk hukum dan naskah dinas. Untuk menjawab masalah tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menjadi wadah (*repository*) produk hukum dan naskah dinas. Pengembangan layanan untuk *repository* telah dilakukan pada beberapa penelitian. Namun pada umumnya memiliki keterbatasan yaitu diantaranya : tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai sebuah naskah dinas, tidak terintegrasi, fokus pada pengetahuan yang termuat dalam sebuah peraturan (mikro) dan tidak/ belum mencakup pengembangan/ pembuatan naskah dinas. Atas dasar tersebut maka penelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan sistem sejenis berupa integrasi antara naskah dinas dan produk hukum dari sumber eksternal dan internal, serta fleksibilitas integrasi. Metodologi/model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *waterfall*. Sebagai tempat atau obyek studi kasus adalah di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Kerangka utama penelitian termasuk dalam hal ini sebagai batasan penelitian adalah merujuk pada peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 3 tahun 2021. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan sistem *repository* dengan kemampuan : 1). menyimpan naskah dinas dan produk hukum dengan fleksibilitas hirarki dan relasi, antar produk hukum, 2). menyimpan atribut produk hukum dan naskah dinas baik dari lembaga penerbit maupun pejabat penerbit, 3). fleksibilitas dalam hirarki lembaga, termasuk diantaranya menyimpan *history* data lembaga. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki, sistem yang dibangun memiliki potensi untuk mencapai tahap temu kembali informasi produk hukum dan naskah dinas pada tingkat yang kompleks.

Kata kunci: *Repository, Produk Hukum, Naskah Dinas, Hukum*

Abstract

The growth of legal products and official documents pose challenges for parties to be able to search, follow, and understand, especially in creating a legal product and official documents. To tackle this problem, a computerized system is needed. Such system has been carried out in several studies with some limitations, e.g., not having complete information about an official document, not being integrated, focusing on knowledge contained in a regulation (micro level) and not covering the creation of official scripts. On this basis, this research has contributed to the development of a similar system in the form of integration between official documents and legal products from external and internal sources, as well as integration flexibility. The system development methodology used in this research is waterfall. The model was chosen because the problems and the technology could have been identified since the early phase. The test results show that this research has produced a repository system with the following capabilities: 1) Storing official documents and legal products with hierarchical flexibility and relationships, between legal products, 2) maintaining the attributes of legal products and official documents from both the issuing

institution and official, 3) flexibility in the institutional hierarchy, including maintaining historical data on institutions. Based on its capabilities, the system has the potential to reach the information retrieval stage of legal products and official documents at a complex level.

Keyword: *Repository, Legal Documents, Law*

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan adanya sebuah sistem yang dapat membantu untuk mengakses produk hukum karena adanya fenomena hiperregulasi telah dijelaskan oleh M. Asshiddiqie [1]. Keberadaan sistem tersebut dapat membantu terciptanya Good Corporate Governance [2], efektifitas pengambilan keputusan [3], memberikan manfaat pada perancang peraturan [4], penyebarluasan produk hukum [5] dan mempercepat proses [6]. Namun disisi lain, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan, khususnya perancang peraturan perundangan belum mendayagunakan sistem informasi hukum untuk membantu aktivitasnya. Selain karena faktor tingkat kemauan dan kemampuan, faktor lain adalah belum tersedianya sebuah sistem informasi yang dapat diandalkan [4].

Kebutuhan akan sistem informasi untuk menyimpan produk hukum pada level pemerintahan pada dasarnya telah cukup disadari [1]. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 telah mengamanatkan melalui JDIH mengenai dibutuhkannya penyebarluasan produk hukum [7]. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut adalah untuk tercapainya pembangunan hukum yang berkualitas. Usaha tersebut perlu untuk disempurnakan, mengingat adanya beberapa kendala. Diantaranya yaitu kendala dalam hal input data produk hukum dan belum optimalnya sanksi administratif berkenaan dengan kewajiban penyebarluasan produk hukum [8]. Disisi lain perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam era 4.0 membuka peluang untuk dikembangkannya sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini akan memiliki peran vital [20].

Para peneliti melakukan studi untuk mencari solusi/ optimalisasi dalam penyebaran produk hukum dan peraturan dengan memanfaatkan perkembangan TIK. Terdapat penelitian yang berupaya untuk melakukan integrasi Sistem Informasi hukum pusat dan daerah dengan teknik/ pendekatan SOA (*service oriented architecture*) [9]. Pada studi tersebut telah dihasilkan sebuah rancangan/ prototipe integrasi dari berbagai sistem informasi hukum. Implementasi sistem informasi hukum juga telah dilakukan beberapa peneliti dengan objek studi kasus di beberapa instansi pemerintahan, diantaranya pada Disnaker [10], kabupaten Solok [11]. Selain itu juga terdapat penelitian yang melihat dari sudut pandang isi dari sebuah peraturan – dengan dibuatnya sebuah sistem yang dapat secara otomatis memberikan peringatan (berbasis kecerdasan buatan) kepada pengendara jika sebuah pelanggaran dilakukan [12].

Dalam perspektif yang lain, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 [13] tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Naskah dinas merupakan alat komunikasi tertulis kedinasan dalam sebuah organisasi yang sangat penting karena menjadi urat nadi organisasi dalam menjalankan strategi organisasi sampai ke level operasional agar dapat berjalan secara efektif, komunikatif dan dapat dipertanggungjawabkan [14]. Pada tahun 2021 terbit peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang naskah dinas yang mengatur mengenai naskah dinas di lingkungan Kemendikbud [15]. Melalui aturan tersebut pemerintah mendukung dibuatnya sebuah sistem pengelolaan naskah dinas yang berbasis elektronik.

Penelitian dalam domain Naskah Dinas telah dilakukan oleh para peneliti dengan

area yang cukup beragam. Berdasarkan platform yang digunakan terdiri dari web dan mobile [16], [17], dengan metode pengembangan waterfall [6] [17] dan rapid application development [16]. Berdasarkan fitur sistem, terdapat studi yang menekankan pentingnya penerapan aspek keamanan dalam sistem dengan menggunakan enkripsi [18]. Dari aspek evaluasi sistem, terdapat penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi tingkat penerimaan sistem [19], tingkat kematangan sistem (*maturity level*) berdasar kerangka kerja ITIL v3 [20] dan evaluasi sistem [21]. Dari sudut pandang manfaat secara umum peneliti berpendapat bahwa, sistem Naskah Dinas perlu dibuat terintegrasi [22], dapat meningkatkan produktivitas staf dalam entri data arsip dan dapat membantu pengguna untuk melakukan temu balik arsip secara cepat dan tepat [23] [24] dimana sistem dapat dibuat dengan kemampuan untuk menemukan data secara cepat dengan menerapkan algoritma tertentu [25].

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari paparan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut: 1). Bahwa dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menampung produk hukum dan naskah dinas di sebuah organisasi. 2). Sistem yang dibuat harus dapat berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi produk hukum dengan memberikan kemampuan dasar pada pengguna untuk dapat menemukan produk hukum, naskah dinas serta relasi dan statusnya. 3). Dibutuhkannya serta dimungkinkannya untuk dibuat sebuah sistem yang bersifat menyeluruh – dari perancangan hingga penerbitan (*publish*) sebuah produk hukum dan naskah dinas.

Object studi kasus pada penelitian ini adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN V Jatim). Dimana pada UPN V Jatim belum terdapat sebuah sistem yang dapat menjadi wadah dari produk hukum dan naskah dinas. Dengan dibuatnya sistem maka implikasi praktisnya/ kemanfaatan yang akan sangat dirasakan. Dari sisi implikasi keilmuan, sejauh yang diketahui penulis belum terdapat sebuah sistem yang dapat membuat naskah dinas (*document maker*) yang terintegrasi dengan repository dan memiliki otentifikasi berupa tanda tangan elektronik dengan role/peran yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021[15]. Atas dasar hal tersebut peneliti pada tahap pertama penelitian bertujuan untuk membuat sistem *Repository* Produk Hukum dan Naskah Dinas. Dan pada tahapan selanjutnya adalah pengembangan sistem Document Maker (Pembuatan Naskah Dinas berbasis *Repository*) yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik.

2. METODOLOGI

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dijelaskan secara lebih terinci berikut ini:

2.1. Requirement Analysis

Tahap ini merupakan tahap penggalan kebutuhan. Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah telaah dokumen terhadap Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Telaah dari dokumen tersebut merupakan langkah utama karena peraturan menteri tersebut menjadi dasar atas terminologi, proses dari naskah dinas. Peraturan-peraturan yang tertuan pada pasal-pasal yang ada akan di *capture* kemudian dituangkan ke dalam sistem. Langkah kedua adalah dengan melakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan khususnya bagian Hukum dan Tata Laksana di UPN “Veteran” Jawa Timur dan BUK. Tahapan ini penting untuk dilakukan mengingat para pimpinan dan staf pada bagian tersebut memiliki *tacit knowledge* yang harus juga diakomodasi ke dalam sistem, terutama untuk hal-hal yang belum tersurat dalam peraturan menteri. Gambaran klasifikasi naskah dinas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Naskah Dinas

Level 1	Level 2	Level 3
Naskah Dinas Arahan	Pengaturan	Peraturan
		Instruksi
		Prosedur Operasional Standar
		Surat Edaran
		Surat Keputusan
	Penetapan	Surat Keputusan
	Penugasan	Surat Perintah
		Surat Tugas
Korespondensi	nota dinas; surat dinas; dan surat undangan.	
Khusus	nota kesepahaman; perjanjian kerja sama dalam negeri; surat kuasa; berita acara; surat keterangan; surat pernyataan; surat pengantar; pengumuman; dan perjanjian internasional	persetujuan (agreement); nota kesepahaman (memorandum of understanding); pengaturan (arrangement); surat pernyataan kehendak (letter of intent)
Lainnya	notula; laporan; dan telaahan staf.	

Langkah berikutnya dilakukan adalah dengan mengunjungi situs web layanan sejenis. Dengan mengunjungi situs web layanan sejenis diharapkan dapat memberikan gambaran dan pilihan-pilihan baik dalam aspek fungsionalitas sistem, antar muka dan fitur dari sistem. Melalui ketiga tahapan ini didapat sebuah daftar kebutuhan fungsional sistem yang memadai.

2.2. Desain Sistem

Setelah kebutuhan fungsionalitas sistem ditentukan, tahap berikutnya adalah pengembangan desain sistem. Desain sistem akan berfungsi sebagai jembatan antara daftar kebutuhan sistem serta proses yang akan berjalan dalam sistem dengan programmer. Dengan demikian diharapkan kebutuhan sistem serta proses yang ada didalamnya dapat diterjemahkan ke dalam sistem.

2.3. Implementasi Sistem

Berdasarkan desain yang telah dibuat *developer* akan menuangkan dalam bentuk *code* perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak akan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yaitu PHP dengan basis data MySQL.

2.4. Pengujian Sistem

Sistem yang telah dikembangkan oleh programmer/ developer akan diuji dengan pendekatan black box. Pengujian akan didasarkan atas use case yang telah dikembangkan pada tahap desain sistem.

2.5. Deployment

Sistem yang telah melalui proses pengujian akan di unggah ke server untuk proses deploy. Pada tahap ini sistem telah dapat digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil perancangan dan implementasi sistem. Karena keterbatasan ruang, hanya beberapa hasil tahapan penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini.

3.1. Tabel Basis Data.

Di bagian ini dijelaskan beberapa tabel utama yang digunakan untuk menampung produk hukum dan naskah dinas.

3.2.1. Tabel Naskah Dinas (t_jenis_naskah_dinas)

Tabel naskah dinas adalah tabel untuk menampung atau mengakomodasi klasifikasi dari naskah dinas. Tabel ini memiliki relasi terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya relasi tersebut sebuah Naskah Dinas dapat memiliki sub naskah dinas dengan tingkat kedalaman yang tidak terhingga.

3.2.2. Tabel Jenis Produk Hukum (t_jenis_produk_hukum)

Sistem yang dikembangkan dibuat agar mampu menampung produk hukum baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal (lembaga pemerintah ataupun dari pihak non pemerintah). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dibuat sebuah tabel yang menampung klasifikasi Jenis Produk Hukum. Dengan adanya tabel ini memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan jenis produk hukum yang akan ditampung ke dalam sistem.

3.2.3. Tabel Produk Hukum Lembaga (t_produk_hukum_lembaga)

Tabel produk hukum lembaga adalah tabel utama dalam sistem yang dikembangkan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh dokumen produk hukum dan naskah dinas yang dihasilkan dari internal organisasi maupun dokumen yang bersumber dari pihak eksternal.

Pada tabel produk hukum lembaga, terdapat beberapa atribut yang merupakan relasi dari tabel lain, misalnya Tema Produk Hukum, Jenis Produk Hukum. Total terdapat dua puluh atribut pada tabel produk hukum lembaga. Diharapkan dengan jumlah *field* yang memadai akan membantu pengguna untuk mengidentifikasi, maupun mencari produk hukum dan produk hukum yang terkait dengan sifat relasi yang beragam.

3.2.4. Tabel Relasi Produk Hukum (t_relasi_hukum_produk_hukum)

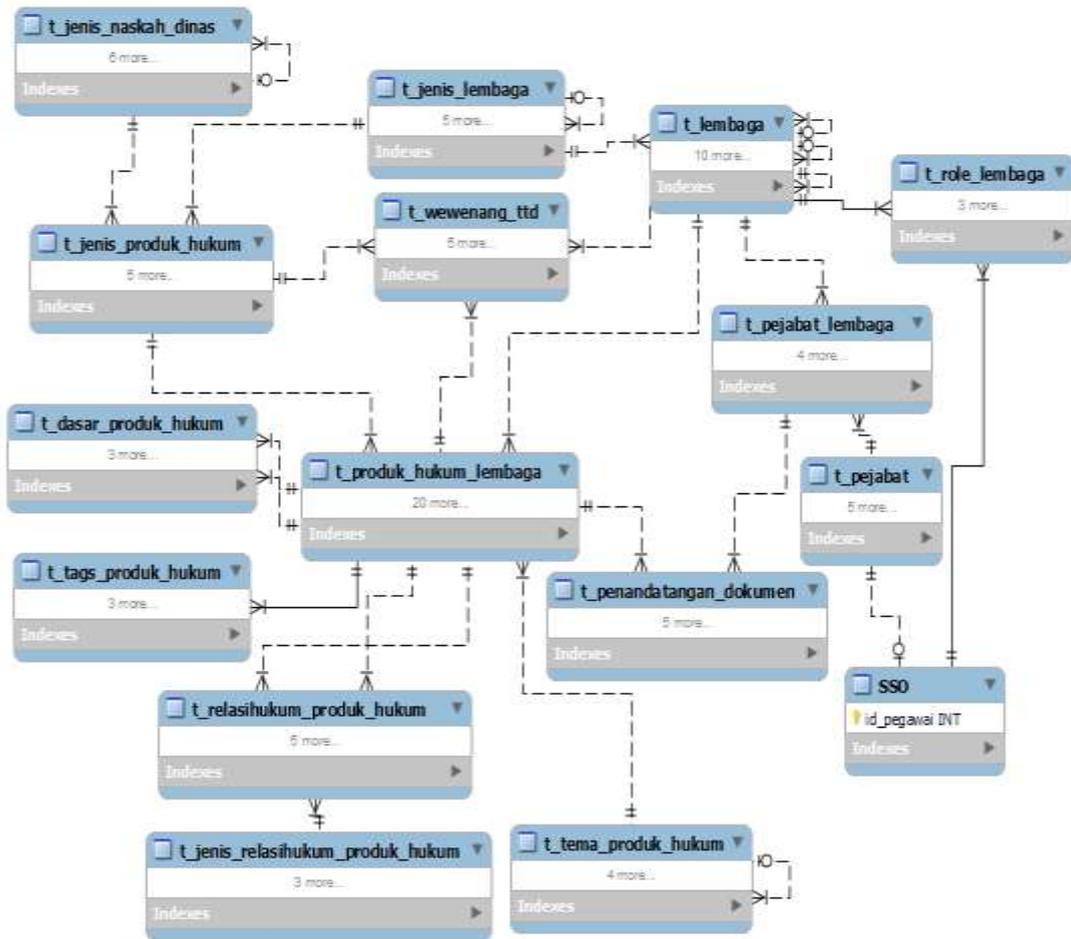
Agar sebuah produk hukum dapat dicatat dan dijaga korelasinya terhadap produk hukum ataupun naskah dinas yang lain, maka dibutuhkan sebuah tabel yang khusus untuk menjaga hal tersebut.

Tabel Relasi Produk Hukum dibuat dengan kemampuan untuk mencatat bentuk relasi antar produk hukum ataupun naskah dinas dengan dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2. Data Model

Data model dibuat untuk dapat menampung atribut dari naskah dinas dan produk hukum secara dinamis. Hal ini ditujukan agar sistem dapat bersifat fleksibel untuk mengantisipasi perubahan terhadap klasifikasi naskah dinas dan produk hukum.

Disamping itu, sifat hubungan antar naskah dinas dan produk hukum dibuat agar mampu mengakomodasi hubungan antar produk hukum yang beragam. Dalam hal ini pengguna memiliki kemampuan untuk membuat sifat relasi antar produk hukum (contoh: menghapus, dihapus, menjelaskan, dijelaskan-oleh). Data model yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Data Model Basis Data

3.3. Tampilan Antar Muka

3.3.1. Fitur Pencarian Produk Hukum

Untuk membantu pengguna mencari produk hukum atau naskah dinas, terdapat fitur pencarian produk hukum. Pada gambar 2 dapat dilihat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mencari sebuah produk hukum. Diantaranya adalah Lembaga, melalui atribut ini, akan di cari produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Kriteria kedua adalah berdasarkan Jenis Produk Hukum. Jenis produk hukum yang dimaksud misalnya adalah Prosedur Operasional Standar, Surat Edaran, Surat Perintah Rektor. Filter/kriteria lain yang dapat digunakan adalah pencarian produk hukum berdasarkan tanggal produk hukum yang dikeluarkan dalam rentang tertentu.

Gambar 2. Pencarian Produk Hukum Atau Naskah Dinas

3.3.2. Relasi Antar Produk Hukum Atau Naskah Dinas

Pada gambar 3 terdapat contoh relasi antara dua buah Produk Hukum. Contoh yang diberikan adalah berupa adanya hubungan "Aturan Payung Dari" dan "Aturan Turunan Dari". Pada gambar 30 dapat dilihat bahwa terdapat Peraturan Nomor 38 Tahun 2015 memiliki relasi "Aturan Payung Dari" Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2018. Selain itu terdapat contoh lain yaitu, Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2018 merupakan "Aturan Turunan Dari" Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018. Dengan adanya fitur/ menu ini dapat dibuat tautan keterkaitan antar produk hukum, sehingga dimungkinkan dilakukannya telusur terhadap sebuah produk hukum.

No	Produk Hukum Mempengaruhi	Produk Hukum dipengaruhi	Nama Relasi Hukum
1	PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	Aturan Payung Dari
2	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	Aturan Turunan Dari

Gambar 3. Tangkapan Layar Relasi Produk Hukum Atau Naskah Dinas

3.3.3. Role Lembaga

Pada gambar 4 dapat dilihat contoh pengguna yang memiliki role yang terkait dengan sebuah Lembaga. Role yang terdapat pada sistem adalah role "new", "update", "delete", dan "read". Apabila seorang pengguna pada sebuah Lembaga (misalnya Lembaga BSRE), dan memiliki hak akses "read", maka pengguna tersebut dapat melakukan aktivitas "read" terhadap produk hukum yang terkait dengan Lembaga BSRE.

No	Nama Lembaga	Nama Pegawai	Roles New	Roles Update	Roles Delete	Roles Read
1		DODDY RIDWANDONO S.KOM., M.KOM.	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
2	Balai Sertifikasi Elektronik	DODDY RIDWANDONO S.KOM., M.KOM.	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
3	Badan Siber dan Sandi Negara	DODDY RIDWANDONO S.KOM., M.KOM.	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF

Gambar 4. Role Pengguna Terhadap Lembaga

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah dapat memberikan fungsi sesuai dengan rencana penelitian. Sistem telah dapat menampung jenis naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2021. Selain itu sistem dapat mengakomodasi jenjang naskah dinas secara dinamis.

Sistem yang dikembangkan juga mampu untuk menampung produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga diluar UPNVJT. Dengan demikian informasi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, dengan menyajikan naskah dinas/ produk hukum internal dan naskah dinas/ produk hukum eksternal. Sistem juga dibangun dengan turut memperhatikan kemungkinan relasi hukum yang terjadi antar naskah dinas/produk hukum. Relasi dapat dibuat secara fleksibel dan dapat ditautkan terhadap produk hukum yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Bentuk relasi yang dinamis memungkinkan penggalian informasi yang lebih komprehensif apabila hal ini diperlukan di kemudian hari.

Role pengguna juga telah diimplementasikan ke dalam sistem. Pada saat sistem diimplementasikan fitur tersebut dapat mendukung sistem akses sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.2. Kesimpulan

Sistem yang dikembangkan sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sistem yang telah ada di lingkungan obyek sutid kasus tempat penelitian ini dilakukan. Diantaranya yaitu, sistem tanda tangan elektronik, sistem e-surat dan *repository*. Diharapkan dalam jangka pendek tercipta integrasi sistem pengelolaan dokumen yang melibatkan beberapa sistem tersebut. Disamping itu, sifat sebuah dokumen produk hukum dan naskah dinas, sebagai contoh : sifat rahasia, terbuka, perlu untuk diadopsi pada penelitian selanjutnya.

Pada tahap berikutnya dimungkinkan untuk dibuat sebuah sistem pengembangan produk hukum (*document maker*). Hal ini dapat dilakukan karena pada sistem yang dibangun telah memiliki klasifikasi naskah dinas yang lengkap, serta memiliki kemampuan untuk menyimpan atribut naskah dinas/ produk hukum yang lengkap diantaranya adalah relasi hukum dan dasar produk hukum. Dengan demikian dapat dibuat sistem yang dapat menghasilkan (*generating*) *draft* produk hukum. Pada tahap yang lebih lanjut, potensi untuk menanamkan algoritma pencarian untuk lebih menajamkan fungsi temu kembali informasi sangat terbuka. Diharapkan dengan adanya hal tersebut makin melengkapi fitur dasar pengelolaan naskah dinas/ produk hukum dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] B. P. H. Nasional, "Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi," pp. 58–59, 2008.
- [2] I. G. A. E. Pertiwi, "Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance," *Jurnal Magister Hukum Udayanan*, vol. 4, no. 3, pp. 442–454, 2015.
- [3] A. Rafi'e and H. Y. Martono, "Aplikasi tata naskah dinas elektronik," *Transformasi dan Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2021.
- [4] M. Aliamsyah, "Pemanfaatan Sistem Informasi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, vol. 6, no. 4, pp. 709–728, 2009.
- [5] B. Muslim and L. Dayana, "Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web," *Jurnal Ilmiah Betrik*, vol. 7, no. 01, pp. 36–49, 2016, doi: 10.36050/betrik.v7i01.11.
- [6] E. Susanti and D. N. Huda, "Sistem informasi pengelolaan tata naskah dinas elektronik pada pemerintah kota tanjungpinang," *Jurnal Bangkit Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 1–9, 2015.
- [7] "JDIHN." <https://jdihn.go.id/sejarah> (accessed Mar. 21, 2022).
- [8] Z. Z. Jusraini, "Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," 2021.
- [9] I. M. F. Fimento, E. Nugroho, and W. W. Winarno, "Perancangan Integrasi Sistem Informasi Hukum Pusat Dan Sistem Informasi Hukum Daerah Berbasis Service Oriented Architecture (Soa)," *Eksplora Informatika*, vol. 2, p. 2, 2013.
- [10] S. R. Natasia, B. R. Harjanto, and Ariyadi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (3P) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Dengan Metode Rapid Application Development," *Teknika*, vol. 10, no. 1, pp. 43–52, 2021, doi: 10.34148/teknika.v10i1.321.
- [11] Lova Gustina Dewi, "Sistem Informasi Peraturan Hukum pada Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kota Solok," 2546.
- [12] D. V. Aladin, O. O. Varlamov, D. A. Chuvikov, V. M. Chernenkiy, E. A. Smelkova, and A. V. Baldin, "Logic-based artificial intelligence in systems for monitoring the enforcing traffic regulations," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 534, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/534/1/012025.
- [13] "Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011.pdf."
- [14] P. Subakti, Y. H. Putra, J. Dipati, U. No, and J. Barat, "Desain Arsitektur Enterprise Naskah Dinas Elektronik menggunakan Togaf 9 . 1 ADM di Perguruan Tinggi," vol. 8, pp. 19–31, 2022.
- [15] M. Pendidikan, D. A. N. Kebudayaan, and R. Indonesia, "Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021," 2021.
- [16] D. Rahmawati, N. Kumaladewi, and Y. Sugiarti, "Sistem Informasi Disposisi Surat Berbasis Android," *Applied Information System and Management (AISM)*, vol. 1, no. 1, pp. 45–50, 2018, doi: 10.15408/aism.v1i1.8671.
- [17] N. Q. N. Ami Latifah, "Pengembangan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Diskominfo Kabupaten Pematang," *Science And Engineering National Seminar 6 (SENS 6)*, vol. 6, pp. 350–357, 2021.
- [18] N. A. K. Febriyani and R. B. Hadiprakoso, "Rancang Bangun Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Berbasis Web Menggunakan WDLC," *Ultima Info.Sys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, vol. 12, no. 1, pp. 43–51, 2021, doi: 10.31937/si.v12i1.1747.
- [19] Rr. T. N. Rahmawaty Sinaga, "Analisis Penerimaan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Naskah Dinas Dan Arsip (Sipena) Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam) Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan," 2021.

- [20] A. Rohmadona, M. U.-B. D. C. On, and U. 2021, “Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Tnde Menggunakan Framework Itilv3 Di Bbws Sumatera Viii,” *Bina Dharma Conference on Computer Science*, pp. 312–316, 2021.
- [21] N. Wattimena and A. D. Manuputty, “Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Naskah Kuno Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga,” *Sebatik*, vol. 25, no. 1, pp. 74–81, 2021, doi: 10.46984/sebatik.v25i1.1315.
- [22] F. Samopa and U. Burhan, “Pembuatan Sistem Informasi Penatausahaan Surat dan Arsip Berbasis Web Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu,” *Jurnal Teknik Pomits*, vol. 2, no. 2, pp. 346–349, 2013.
- [23] S. Iksaningtyas and R. Rukiyah, “Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Dalam Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Di Setda Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol. 7, no. 3, pp. 231–240, 2018.
- [24] A. A. Prasetyo, “Evaluasi penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) sebagai sarana temu kembali arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, vol. 2, no. 1, pp. 12–26, 2021.
- [25] W. L. Yuniar and F. Amin, “Sistem Pencarian Naskah Dinas Dengan Algoritma Sequential Search,” *Jurnal Manajemen Informatika dan ...*, vol. 4, no. 2, pp. 92–100, 2021.